

pihak pengelola BLUD Dana Bergulir kepada masyarakat tentang pengeolaan dana nya.

- 2) Sebaiknya dalam pemberian dana bergulir kepada masyarakat itu harus teliti dalam memilih siapa yang berhak dalam mendapatkan pinjaman dana bergulir tersebut, harus didasarkan pada prinsip 5C agar tidak banyak masalah kredit macet oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zianal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2004), hal. 25

Djumhana Muhammad, Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, (UI:2003),hal. 372.

Fahmal, HA Muin, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, (Yogyakarta, UIII Press, 2006).

Ibrahim Johannes, Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah,(PT Refika Aditama, Bandung, 2004), hal. 17.

_____, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi), (Manda Maju, Bandung, 2004), hal.10.

_____,Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004) hal. 93.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta:Rajawali Pers), 2008

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta:Grafindo,2002)

Lukman Mediya, Badan Layanan Umum dari Birokrasi Menuju Korporasi, (Jakarta, PT Bumi Aksara,2013)

Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi,(BPFE, Yogyakarta, 2000), hal.263

Peter, Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2005), hal. 53

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press, 1986), hal 42.

Usman Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama 2001) hal.236

Winarno, Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta:Media Press, 2005), hal. 67

B. Jurnal

Ashar Khusul, 2011, Analisis Terhadap Kestinambungan Lembaga Pembiayaan Pedesaan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Jurnal Of Indonesian Applied Economic, Vol.5, No. 1

Barbara Gunawan, (2001), Anjak Piutang:Sebuah Alternatif Memperoleh Dana Usaha, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol.2 No.2, hal:137-146

Greydy Normala Sari,(2013), Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit bank Umum di Indonesia,Jurnal Emba:Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Vol 1, No 3

H.Juliani, (2018), Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik, Jurnal Adminitrative Law and Governance, Vol.1 , No.1

Mujtaba, Muhammas Habibi, 2015, Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 28 , No.2

- Nugroho Bramosto, (2010), Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulue Hutan Rakyat, JHMT Vol,XVI, (3):118-125
- Prakoso, Cathas Teguh, 2014, Eksistensi Badan Layanan Umum Ditinjau Dalam Perspektif New Institutional Dan Principal-Agent Theory, Jurnal Administrative Reform, Vol. 2, No.4
- Putra, Jondra Jaya, 2013, Implementasi Badan Layanan Umum Daerah, Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol.2, No.2
- Ratna Suryaningsih,(2005), Kinerja Keuangan Layanan Kesehatan Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK BLU,Jurnal Bisnis & Manajemen,Vol.15,No.1 : 57-80
- Santoso Budi, 1997, Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional Dalam Kehidupan Nasional Perencanaan Pembangunan, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 2, No.3
- Saraswati, Rosita Ayu, 2012, Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada Pd Bpr Bank Pasar Kabupaten Temanggung, Jurnal Nominal, Vol 1, No 1
- Suandi, I Wayan, 2010, Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggraan Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1, No.01

- Supriyanto, (2006), Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol 3, No 1
- Waluyo Budi, 2014, Analisis Permasalahan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Jurnal Infoartha, Vol. 3 No. 3
- Wicaksono Tri, 2016, Aspek Hukum Penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU) Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Jurnal Bidang Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1

C. Peraturan Perundang-undangan

- Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
- Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Pasal 145 dan 146 PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 1 Permendagri No. 61 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 1 angka (2) Kepres No. 61 Tahun 1988

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara

Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

D. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

E. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan

Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk

Tagihan

F. Wawancara

Wawancara dengan Petrini, A.Md di Kantor UPTD Fasilitas Pembiayaan

Pada tanggal 20 November 2020 di Kota Payakumbuh.